

**PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA  
AGRIBISNIS PEDESAAN (PUAP) DI NAGARI BUKIK SIKUMPA  
KEC. LAREH SAGO HALABAN KAB. LIMA PULUH KOTA**

**OLEH:**

**RAFNEL AZHARI**  
**06115022**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010**

**PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS  
PEDESAAN (PUAP) DI NAGARI BUKIK SIKUMPA KEC. LAREH SAGO  
HALABAN KAB. LIMA PULUH KOTA**

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis pedesaan (PUAP) tahun 2009 di Nagari Bukik Sikumpa Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian dilakukan selama dua bulan terhitung mulai bulan Juli hingga bulan Agustus 2010. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Nagari Bukik Sikumpa Kecamatan Lareh Sago Halaban tahun 2009; dan (2) menganalisis masalah-masalah dalam pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Nagari Bukik Sikumpa Kecamatan Lareh sago Halaban.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case study*) dan analisa data dengan Deskriptif Kualitatif. Responden adalah sebanyak 25 orang yang diambil secara acak sederhana. Dari 10 kelompok tani yang tergabung ke dalam Gapoktan Rama Sinta di Nagari Bukik Sikumpa, dan sejumlah informan kunci dari Sekretariat tim teknis PUAP Propinsi Sumbar, sekretariat tim teknis PUAP Kabupaten Lima Puluh Kota, sekretariat tim teknis PUAP kecamatan Lareh Sago Halaban, Wali Nagari Bukik Sikumpa, Ketua Gapoktan Rama Sinta, Manajer LKM-A Rama Sinta, Penyelia Mitra Tani dan Penyuluh Pendamping.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan di Nagari Bukik Sikumpa tidak berjalan dengan baik, karena tidak semua petunjuk teknis dilaksanakan dilapangan. tunggakan pinjaman mencapai 56% dan semua tunggakan ini berasal dari usaha budidaya jagung, Ubi kayu dan Padi. Masalah-masalah yang menghambat pelaksanaan Program PUAP di Nagari Bukik Sikumpa antara lain: (1) Penyuluh pendamping yang seharusnya banyak berperan dalam melakukan pendampingan terhadap Gapoktan Rama Sinta tidak melakukan peranannya dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis yang ada; (2) PMT yang hanya satu orang tidak mampu dalam melakukan pengawasan dan pendampingan karena wilayah kerja seluruh Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri atas 12 Kecamatan yang mendapatkan program PUAP; (3) Sosialisasi yang dilakukan belum dipahami secara baik, sehingga petani peserta program banyak menganggap program ini bersifat hibah sehingga mereka merasa pinjaman yang mereka terima tidak perlu dikembalikan; (4) Tidak semua pinjaman disalurkan oleh petani Responden kepada usaha. Pada sebagian responden yang menunggak ditemukan bahwasanya besarnya pinjaman yang disalurkan kepada usaha hanya 40%-50% selebihnya terpakai untuk kebutuhan lain; (5) Tim teknis kecamatan tidak melakukan pertemuan secara reguler dengan petani sehingga pembinaan tidak berjalan dengan lancar

Dalam Pelaksanaan Program PUAP ini disarankan: (1) Melakukan tinjauan ulang dan evaluasi terhadap ketidak efektifan kerja aparat terkait (PMT, Penyuluh pendamping dan Tim teknis kecamatan); (2) melakukan kembali kegiatan sosialisasi guna memahamkan petani tentang program PUAP; (3) Melakukan pengawasan secara ketat dan tegas.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan pembangunan pedesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Karena desa adalah sebagai basis dari masyarakat Indonesia yang merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi berhasilnya usaha pembangunan bagi manusia yang menyeluruh. ( Sumodiningrat, 1996).

Lebih lanjut Sumodiningrat menyatakan bahwa, konsep pembangunan telah dikembangkan untuk mengatasi masalah kemiskinan yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai dasar pemupukan modal. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pemberian bantuan dana sebagai modal usaha, pelatihan yang tepat, penerapan teknik yang tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung, penyediaan sarana yang menunjang dan penguatan kelembagaan sebagai wadah masyarakat ( Sumodiningrat, 1996).

Jumlah penduduk miskin yang tinggi menuntut dilakukan langkah-langkah konkrit dan mendasar untuk menekan angka tersebut. Oleh karena itu, menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai suatu prioritas dalam pembangunan merupakan hal yang sangat positif. Dengan kata lain diperlukan kebijakan yang spesifik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat petani miskin di pedesaan, berupa pengaplikasian program pembangunan. Bila tidak, hal ini akan membuka peluang munculnya permasalahan yang dapat mengancam proses keberlanjutan pembangunan itu sendiri (Nurmanaf, 2009).

Banyak program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan, baik berupa program jangka panjang, maupun jangka pendek. Program jangka panjang lebih diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat. Sementara program jangka pendek yang secara masal dilaksanakan untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan

minimum standar hidup pokok. Berbagai hambatan ditemui dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan terutama disebabkan oleh sosialisasi yang kurang efektif baik pada anggota masyarakat yang menjadi sasaran program maupun para pelaksana program itu sendiri. Sebagian besar program tidak mengikutsertakan secara aktif masyarakat luas. Dengan demikian, banyak dijumpai kasus bahwa program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran baik jenis kegiatan maupun kelompok targetnya (Nurmanaf, 2009).

Studi yang dilakukan Bagong Suyanto menemukan kesimpulan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan yang digulirkan terutama dalam bentuk pemberian subsidi dan bantuan modal usaha atau pembinaan usaha produktif keluarga miskin-- seringkali masih terkonsentrasi pada rekayasa yang sifatnya teknis produksi dan cenderung hanya berorientasi kuantitas, sehingga dalam banyak hal lebih menguntungkan kelompok masyarakat yang memiliki modal dan asset produksi yang berlebih. (Suyanto, 2005).

Menurut Jhingan (1999), hambatan yang paling erat berkaitan dengan perkembangan ekonomi adalah kelangkaan modal. Kemiskinan merupakan penyebab sekaligus akibat dari rendahnya tingkat pembentukan modal suatu negara. Sebab utama kekurangan modal adalah kecilnya tabungan atau kurangnya investasi di dalam produksi yang mampu menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena pendapatan per kapita rendah, penduduk tidak dapat menabung banyak, sehingga bagian yang tersisa untuk investasi lebih lanjut hanya sedikit. Hal ini mengakibatkan produktivitas masyarakat dalam berusaha menurun. (Jhingan, 1999).

Modal merupakan masalah utama yang selalu muncul dalam upaya pengembangan potensi dan kemampuan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Upaya peningkatan pendapatan masyarakat baik melalui penerapan teknologi maupun melalui penggunaan Inovasi selalu terkendala oleh kelangkaan modal. Telah banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan telah banyak sistem yang dikembangkan untuk penguatan modal masyarakat, tetapi selalu kandas di tengah jalan. Mulai dari KUT (Kredit Usaha Tani), Kredit Candak Kulak, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Bantuan Pinjaman Langsung masyarakat (BPLM) dan lain sebagainya.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan di Nagari Bukik Sikumpa mencapai tunggakan pinjaman 56% dan semua tunggakan ini berasal dari usaha Budidaya tanaman Pangan dan Hortikultura ( Budidaya Jagung, Budidaya Ubi Kayu, Budidaya Padi dan Budidaya Cabe). Tidak semua petunjuk teknis dilaksanakan dilapangan, sehingga pelaksanaan program PUAP di Nagari Bukik Sikumpa tidak berjalan dengan baik.
2. Masalah – masalah yang menghambat pelaksanaan Program PUAP di Nagari Bukik Sikumpa antara lain :
  - a. Penyuluh pendamping yang seharusnya banyak berperan dalam melakukan pendampingan terhadap Gapoktan Rama Sinta tidak melakukan peranannya dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.
  - b. PMT yang hanya satu orang tidak mampu dalam melakukan pengawasan dan pendampingan karena memiliki wilayah kerja seluruh Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri atas 12 Kecamatan yang mendapatkan program PUAP.
  - c. Sosialisasi yang dilakukan belum dipahami secara baik, sehingga petani peserta program banyak yang menganggap bahwa program ini bersifat hibah sehingga mereka merasa, pinjaman yang mereka terima tidak perlu di kembalikan.
  - d. Tidak semua pinjaman disalurkan oleh petani Responden kepada usaha. Pada sebagian Responden yang menunggak ditemukan bahwasanya besarnya pinjaman yang disalurkan kepada usaha hanya 40%-50%, selebihnya terpakai untuk kebutuhan lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustar.A.1999. *Efektifitas program pembangunan pedesaan di Sumbar*. Laporan Penelitian BAPPEDA. Sumbar. Padang
- Arikunto, Suharsismi.1988. *Penilaian Program*. Rineka Cipta. Jakarta
- Asnawi, sjofoyan.1999. *Perkembangan Pemikiran : Pembangunan Wilayah Pedesaan*. PSI-SDAU. Padang.Unand.
- BPS. 2006. *Angkatan Kerja, Pola Konsumsi dan Kemiskinan Penduduk*. Sumatra Barat.
- Chambers, Roberts. 1987. *Pembangunan desa dimulai dari belakang*. LP3ES. Jakarta
- Daniel.2007. *Penanggulangan Kemiskinan*. [www.ekonomirakyat.org](http://www.ekonomirakyat.org).
- Daniel, Moehar. 2003. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Bumi Aksara. Jakarta
- Deptan. 2009. *Pedoman Umum PUAP*. [www.deptan.go.id](http://www.deptan.go.id). [ 25 November 2009].
- Deptan. 2009. *Petunjuk Teknis BLM-PUAP*. [www.deptan.go.id](http://www.deptan.go.id) [ 25 November 2009]
- Deptan.2009. *Petunjuk Teknis Penyelia Mitra Tani*. [www.deptan.go.id](http://www.deptan.go.id). [ 25 November 2009]
- Deptan.2009. *Petunjuk Teknis Penyuluh Pendamping*. [www.deptan.go.id](http://www.deptan.go.id). [ 25 November 2009].
- Dewi, Weni. 2008. *Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan berbasis Nagari Tahun 2007 di Nagari Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman*.( Skripsi) Universitas Andalas.
- Esmara.H.1986. *Perencanaan dan Pembangunan Indonesia*. Jakarta.Gramedia.
- Helmi, Efrida. 2006. *Perbandingan Kriteria Kemiskinan Menurut Pemerintah Dengan Masyarakat Miskin dan Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Miskin di Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang [ skripsi]*. Padang. Universitas Andalas.
- Israel, A. 1992. *Dalam Syuib. Efektifitas Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Padang Panjang*. [Tesis]. Padang. Univesitas Andalas
- Jhingan, M.L. 1966. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Press, Jakarta.